



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo Tahun 2011, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2011;
- b. bahwa untuk mendukung keberadaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran ini, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo tahun 2010 – 2014;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011;

- c. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- d. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi;
- e. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- f. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- g. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
- i. Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah seluruh Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2011 adalah merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Probolinggo Tahun 2011 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, kedudukan RPD tahun rencana dalam proses perencanaan pembangunan dan proses penyusunan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Merupakan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana dikaitkan dengan RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan visi dan misi.

1.4 Sistematika

Menguraikan susunan dokumen RKPD terkait pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II VISI, MISI, ISU STRATEGIS DAN MASALAH MENDESAK

2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

2.2 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
- 3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010
 - 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011
 - 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.4 Analisis dan Perkiraan Sumber – sumber Pendanaan Daerah
 - 3.5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.6 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.7 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.8 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
- BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
- 4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
 - 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 3

Isi dan uraian sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang memuat naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2010 dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, adalah hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Probolinggo dengan mengedepankan dan memperhatikan aspirasi masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah;
- (2) Seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah berkewajiban memedomani dan memperhatikan serta melaksanakan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2010.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Juni 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I

NIP. 19660817 199203 1 016



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2011**

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2010

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika	3
BAB II : VISI, MISI, ISU STRATEGIS DAN MASALAH MENDESAK	
2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah	5
2.2 Isu Strategis dan Masalah Mendesak	6
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH	
3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010	15
3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011	15
3.3 Arah Kebijakan ekonomi Daerah	20
3.4 Analisis dan Perkiraan Sumber – sumber Pendanaan Daerah.	21
3.5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	22
3.6Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	23
3.7Arah Kebijakan Belanja Daerah	24
3.8Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	24
BAB IV : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010	
4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	26
4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.....	28
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	34
BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD ini merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah Kota Probolinggo tahun 2011 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2014 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Kerja Pemerintah Propinsi Jawa Timur. RKPD Kota Probolinggo Tahun 2011 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang akan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 Kota Probolinggo merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010, pelaksanaan dari Undang - undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan penjabaran Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2014.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, prioritas pembangunan tahunan disusun dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran - sasaran pembangunan yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.
3. Merupakan tugas Pemerintah Daerah sebagai pelaksana utama (sedapat mungkin dalam rentang kendali pemerintah daerah untuk mewujudkannya).
4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dan sesuai dengan RPJMD Kota Probolinggo 2010 - 2014, RKPD Kota Probolinggo tahun 2011 memuat prioritas

pembangunan, program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara teknis oleh Instansi di Jajaran Pemerintah Kota Probolinggo yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo. Dengan demikian RKPD Kota Probolinggo tahun 2011 mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian di jajaran Pemerintah Kota Probolinggo, karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Kewajiban daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- j. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2011 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD);
- b. Penyusunan Kebijakan Umum (KU), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2011 adalah guna mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya alam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2011, yang menjembatani antara perencanaan jangka menengah daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, kedudukan RPD tahun rencana dalam proses perencanaan pembangunan dan proses penyusunan RKPD

1.2 Landasan Hukum

Merupakan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana dikaitkan dengan RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan Visi dan Misi.

1.4 Sistematika

Menguraikan susunan dokumen RKPD terkait pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. VISI, MISI, ISU STRATEGIS DAN MASALAH MENDESAK

2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

2.2 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan tahun 2011

3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.4 Analisis dan Perkiraan Sumber – sumber Pendanaan Daerah

3.5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.6 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.7 Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.8 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN

BAB II

VISI, MISI, ISU STRATEGIS DAN MASALAH MENDESAK

2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselerator kinerja bagi daerah tersebut.

Dengan memperhatikan pengertian visi dan melalui pendekatan membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Kota Probolinggo, maka ditetapkan visi Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014. Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2014 Kota Probolinggo adalah :

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO MELALUI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN BERBASIS INVESTASI PRODUKTIF DAN BERKESINAMBUNGAN

Setiap daerah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum yang terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi Kota Probolinggo tahun 2010 - 2014 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan;

3. Mewujudkan iklim investasi yang prospektif dan kondusif yang didukung oleh sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima;
4. Menegakkan supremasi hukum, ketentraman dan ketertiban umum yang disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa belandaskan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik.

Keempat misi tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Probolinggo. Keempat misi tersebut dilaksanakan secara sinergis. Keberhasilan pelaksanaan satu misi akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan misi lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan secara rinci kedalam RKPD dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, masalah dan tantangan yang dihadapi. Mengingat keberhasilan sumber daya yang terbatas berdasarkan kebijakan pembangunan yang ditentukan setiap tahunnya, ditetapkan prioritas pembangunan tahunan yang mengarah pada rencana aksi bagi pencapaian sasaran - sasaran pembangunan.

Dalam rangka menjalankan misi yang telah ditetapkan maka disusun tujuan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2010-2014. Pada hakekatnya setiap misi akan tercermin dalam program yang tepat dan sesuai dengan memperhatikan masalah - masalah yang dihadapi dan sasaran - sasaran yang hendak dicapai.

2.2 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Permasalahan Sosial

Masalah sosial merupakan hasil dari proses perkembangan masyarakat dalam penyesuaian diri terhadap perubahan - perubahan yang menimbulkan problema sosial, yaitu ketidaksesuaian antara unsur - unsur dalam masyarakat yang dapat mengganggu tertib sosial. Problema sosial masyarakat perkotaan di Kota Probolinggo sangat dimensional, namun yang menonjol dan memerlukan perhatian adalah :

1. Masalah dampak urbanisasi yang belum sepenuhnya terkendali
Urbanisasi yang cenderung terus berlangsung menyebabkan ketidak seimbangan tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia pada sektor perkotaan, dan ketidakseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung fasilitas perkotaan. Implikasinya adalah terjadinya kecenderungan meningkatnya jumlah pengangguran, semakin meluasnya permukiman kumuh dan padat, kesenjangan antar penduduk kota, sektor informal yang tidak terkendali dan meningkatnya ancaman gangguan tramtibmas.
2. Kesenjangan dan konflik sosial yang masih belum teratasi
Kesenjangan adalah masalah kota yang cukup menonjol, baik kesenjangan antar golongan penduduk yang tampak dari distribusi pendapatan maupun kesenjangan antar sektor ekonomi yang tampak dari kesenjangan produktivitas, akses terhadap pasar, akses terhadap modal dan manajemen. Kesenjangan yang sempat meluas pada pasca krisis ekonomi akan memicu kesenjangan sosial, hingga saat ini masih belum sepenuhnya dapat diatasi.
3. Pengguna Narkoba dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum sepenuhnya teratasi
Kasus penyalahgunaan narkoba telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat dan bahkan dunia pendidikan. Seperti fenomena gunung es, kasus yang tampak hanya kecil (hanya sekitar kurang dari 10 persen dari mereka yang menyalahgunakan narkoba

mencari pengobatan ke rumah sakit), tetapi ternyata permasalahan yang dihadapi cukup luas dan kompleks. Penyalahgunaan narkoba yang semakin marak telah menimbulkan banyak korban dan mengancam masa depan bangsa. Permasalahan yang dihadapi masyarakat perkotaan dapat dikatakan lebih serius, karena akses terhadap sumber permasalahan juga lebih luas dan kompleks.

Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang antara lain nampak dari meningkatnya jumlah gelandangan, pengemis, pengamen dan peminta-minta di perempatan jalan, disamping memperburuk wajah kota, pada kesempatan tertentu tidak mustahil membuka ruang timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan dan kekhawatiran warga kota.

4. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal

Kesenjangan distribusi pendapatan berimplikasi pada aksesibilitas warga kota untuk memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Tingkat pendidikan yang rendah dan derajat kesehatan yang buruk dari sebagian warga kota tercermin dari kualitas kehidupan masyarakat dan wajah fisik kota, dan juga berkorelasi positif dengan masalah - masalah sosial kota.

Permasalahan Ekonomi

Meskipun Pemerintah Kota Probolinggo telah berupaya melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak krisis ekonomi, namun hasilnya belum cukup optimal. Kesenjangan ekonomi baik antar pelaku ekonomi maupun antar golongan pendapatan masih cukup terasa dan terjadi pada segala aspek kehidupan, sehingga struktur dan fundamental ekonomi sangat rentan terhadap gejolak yang terjadi.

1. Masalah pemulihan perekonomian daerah yang belum optimal

Upaya pemulihan ekonomi sempat mengalami tantangan baru di luar faktor ekonomi seperti terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan imbas terjadinya perseteruan elit politik yang kesemuanya kurang memberi iklim kondusif bagi upaya percepatan pemulihan ekonomi. Dampak dari kondisi lambatnya pemulihan ekonomi daerah adalah menurunnya tingkat investasi sektor swasta. Disamping itu, kebijakan nasional yang berubah - ubah juga menyebabkan iklim tidak kondusif untuk upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah, sehingga berdampak pada rendahnya pertumbuhan perekonomian daerah sehingga tidak mampu meningkatkan lapangan kerja secara berarti.

2. Masalah pedagang kaki lima yang belum sepenuhnya terkendali

Krisis ekonomi dan urbanisasi menyebabkan banyaknya penduduk kota bekerja pada sektor informal, terutama pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang meningkat cukup pesat dan keterbatasan daya tampung ruang yang tersedia di pasar atau tempat - tempat yang telah disediakan, menyebabkan pedagang kaki lima mengambil tempat di emperan toko, di trotoar, badan jalan atau di berbagai fasilitas umum lainnya. Keberadaan mereka di tempat - tempat yang tidak semestinya telah mengganggu kepentingan dan ketertiban umum dan seringkali menimbulkan masalah-masalah sosial baru, seperti gangguan terhadap lalu lintas, sampah yang tidak terkendali, perlawanan terhadap upaya penertiban dan meningkatnya kriminalitas.

3. Masalah partisipasi UKM yang belum optimal

Persaingan dunia usaha yang semakin ketat antar pelaku ekonomi menuntut kemampuan untuk memiliki daya saing yang berkelanjutan. Kemampuan usaha kecil dan menengah di perkotaan dalam memperebutkan pasar yang semakin kompetitif sangat terbatas. Pengelolaan usaha belum efektif sehingga tidak mampu bersaing dengan kompetitor besar, apalagi kompetitor asing. Keterbatasan akses pasar, keterbatasan pada akses sumber - sumber permodalan dan keterbatasan manajemen menjadi hambatan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah perkotaan.

4. Masalah pengangguran dan kemiskinan

Laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan cukup tingginya angka pengangguran di Kota Probolinggo. Daya serap lingkungan kerja yang belum membaik akibat krisis ekonomi, meningkatnya pendatang baru yang mencari pekerjaan di Kota Probolinggo, jelas semakin membebani Kota Probolinggo dalam penanggulangan masalah tenaga kerja sektor perkotaan.

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada jumlah penduduk miskin yang jumlahnya ternyata masih cukup besar. Inflasi yang cukup tinggi, nilai tukar rupiah yang relatif lemah dan jumlah pengangguran yang meningkat akibat sulitnya lapangan kerja di sektor perkotaan, makin memperburuk peta kemiskinan penduduk kota dengan berbagai implikasinya.

Permasalahan Sarana dan Prasarana Kota

Keterbatasan sarana dan prasarana kota telah menjadi persoalan klasik. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat perlu diikuti dengan serangkaian program investasi perkotaan dalam bentuk memperluas pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan di seluruh wilayah kota. Problema penyediaan sarana dan prasarana kota sesuai tuntutan di atas, biasanya terletak pada keterbatasan dana yang cukup untuk membangun dan memelihara prasarana kota, keterbatasan pemerintah kota dalam penyesuaian prosedur dan mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana kota dan penerapan metode pengembalian biaya (*cost recovery*) yang belum efektif dan konsisten serta belum efektifnya penegakan hukum menyangkut pengaturan kota.

1. Ruang terbuka hijau dan keindahan kota yang belum optimal

Peningkatan kualitas lingkungan terkait dengan tersedianya ruang terbuka hijau yang seimbang dengan kebutuhan fungsi ekologis untuk menjaga kualitas udara dan lingkungan. Realitas yang ada menunjukkan ruang terbuka hijau semakin menyempit karena perubahan fungsi untuk kebutuhan prasarana kota dan penggunaan tanah secara liar serta penyerobotan tanah yang sebenarnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau kota. Sementara itu, pengadaan ruang terbuka hijau di kawasan baru belum optimal karena mahalnya harga tanah dan sulitnya pembebasan tanah.

Intensitas kegiatan yang tinggi dan penggunaan fungsi lahan yang menyimpang, juga menimbulkan masalah - masalah keserasian dan keindahan lingkungan kota yang semakin meningkat. Keberadaan taman-taman kota dan hutan kota masih belum dapat diwujudkan dengan optimal, baik pengembangan maupun pemeliharannya.

2. Kualitas lingkungan yang belum memadai

Lingkungan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan. Untuk itu upaya menciptakan suasana kota yang bersih, terbebas dari segala polusi dan penumpukan sampah perlu dilakukan guna mencapai kesejahteraan

masyarakat dalam kualitas lingkungan yang semakin baik dan sehat. Memang kegiatan yang tinggi menimbulkan masalah - masalah lingkungan yang semakin meningkat. Pencemaran udara berlangsung dengan intensitas tinggi yang berasal dari sumber bergerak (transportasi), sumber tidak bergerak (proses industri dan rumah tangga) dan sumber dari pembuangan/pembakaran limbah padat. Pencemaran air juga terjadi dalam skala luas, bersumber pada limbah cair kegiatan usaha dan rumah tangga.

3. Penataan ruang yang belum efektif memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat
Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk memberi arah bagi pembangunan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu penataan ruang juga bertujuan untuk memanfaatkan ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masalah substansial dan operasional dalam penataan ruang selain karena tata ruang masih bersifat abstrak interpretatif, adalah juga karena adanya kecenderungan egoisme sektoral, sehingga penataan ruang yang dilakukan bersifat birokratis. Pada sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan perorangan dan kolektif yang bertentangan dengan tata ruang, kemiskinan kota dan tekanan penambahan penduduk telah menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan, yang membawa implikasi pada tidak terintegrasinya tata ruang wilayah dengan pemanfaatan ruang.
4. Lalu lintas dan transportasi umum yang belum memadai
Mobilitas yang tinggi adalah ciri dari sebuah kota yang dinamis. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan panjang dan ruas jalan berakibat meningkatnya kepadatan lalu lintas yang bisa menimbulkan kemacetan. Apalagi melalui kota Probolinggo, terbentang jalur jalan lintas selatan, baik menuju kota - kota di Propinsi Jawa Timur bagian Timur maupun menuju ke Propinsi Bali. Banyaknya jumlah kendaraan di jalan bila tidak diantisipasi dapat menimbulkan penambahan titik - titik rawan kemacetan. Penambahan kendaraan di jalan dipacu oleh kondisi angkutan umum yang kurang nyaman dan tidak tertib, sehingga menjadikan penggunaan kendaraan pribadi menjadi pilihan warga kota. Kondisi ketidakteraturan lalu lintas di jalan diperparah dengan meningkatnya jumlah becak dan tingkat kedisiplinan pengemudinya yang sangat rendah.
5. Pengelolaan sampah dan air limbah yang belum sepenuhnya tertangani dengan baik
Masalah sampah yang menonjol di Kota Probolinggo tampak pada pewardahan dan pengumpulan, terutama pada wilayah sekitar pasar, tempat - tempat umum dan permukiman padat penduduk dan kumuh, yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu sistem, sehingga pengangkutan sampah belum optimal. Pembangunan sistem peralihan antara yang belum sepenuhnya terealisasi, kualitas dan jumlah armada pengangkutan sampah dan air limbah yang terbatas, menyebabkan sistem pengangkutan sampah sampai ke TPA belum optimal. Begitu pula pengelolaan air limbah belum ditangani dengan baik.
6. Jangkauan fasilitas air bersih yang masih terbatas
Pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan merupakan salah satu jasa pelayanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kota. Pada aspek ini pelayanan di Kota Probolinggo belum optimal, yang tampak dari belum optimalnya jaringan pelayanan ke seluruh wilayah dan penjurur kota, cakupan pelayanan yang belum cukup luas dan produksi yang belum optimal. Dengan kondisi demikian maka

penggunaan air tanah masih cukup luas. Penambahan produksi dan perluasan jaringan layanan memerlukan biaya yang cukup besar. Penurunan kualitas dan kuantitas karena aktivitas penduduk di sektor *catchment* menyebabkan menurunnya kualitas air dan kelangsungan produksi air minum.

7. Sistem drainase kota yang belum sepenuhnya baik

Berkembangnya hunian penduduk ke arah lahan basah atau daerah parkir air menyebabkan kemampuan tanah menyerap air menjadi berkurang. Kecenderungan terjadinya penyempitan alur sungai daerah hilir yang diperparah dengan sedimentasi sungai pada daerah yang relatif datar, serta hujan lokal dengan intensitas tinggi pada saat laut pasang, adalah merupakan faktor - faktor determinan terjadinya genangan air lokal atau banjir kota yang sulit dihindarkan.

Berkembangnya permukiman penduduk di sepanjang bantaran sungai telah menyebabkan terjadinya penyempitan alur sungai dan tidak optimalnya fungsi sungai sebagai pencegah banjir.

8. Perumahan dan penanganan daerah kumuh yang belum optimal

Besarnya jumlah penduduk yang bermukim pada lahan terbatas menjadi akar masalah perumahan. Kondisi ekonomi yang lemah dari sebagian warga kota menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk memiliki lahan dan perumahan yang layak. Penataan dan penyehatan lingkungan permukiman kota mendesak untuk dilaksanakan. Sementara itu upaya penertiban tampak belum dapat berjalan lancar karena sikap resistensi dari masyarakat dan isu HAM. Penertiban juga seringkali terlambat setelah persoalannya bertambah besar.

9. Areal interaksi publik yang masih terbatas

Jumlah penduduk kota yang bertambah padat mengakibatkan semakin meningkatnya permintaan akan areal interaksi publik yang berguna sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Karenanya pada kawasan - kawasan terbangun kota, perlu penyediaan sarana interaksi publik tersebut, sehingga tidak timbul kesulitan pada waktu mendatang.

Permasalahan Manajemen Pemerintahan

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu menjamin ketentraman dan ketertiban, menyelenggarakan pelayanan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Problema dalam mengoptimalkan efektivitas pemerintahan adalah akseptabilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah cenderung menurun setelah masa reformasi. Lemahnya legitimasi menyebabkan kurang efektifnya pemerintah sebagai institusi pengatur yang berwibawa. Permasalahan inti yang dihadapi dalam pengelolaan pemerintahan adalah :

1. Partisipasi masyarakat dan peran aktif kelembagaan masyarakat yang belum optimal

Implikasi dari krisis multidimensi yang terjadi pasca pemerintahan Orde Baru termasuk krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Karenanya diperlukan upaya untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah guna mendorong peningkatan partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan.

Kurang optimalnya lembaga-lembaga kemasyarakatan menjalankan peranan dalam memelihara keselarasan sosial, menjaga moralitas dan harmoni sosial, dikhawatirkan akan menurunkan daya tangkal terhadap berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban sosial di perkotaan. Karenanya diperlukan upaya untuk mendorong agar lembaga - lembaga kemasyarakatan dapat menjalankan peranannya secara bertanggungjawab.

2. Peraturan perundang - undangan daerah yang belum memadai
Kurang efektifnya upaya - upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan penegakan hukum, disamping upaya yang dilakukan selalu direspon dengan perlawanan oleh warga kota, juga sebenarnya disebabkan peraturan perundangan yang ada belum optimal, dan sebagian lagi sudah tidak relevan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat pada saat sekarang, dan karenanya memerlukan peninjauan dan evaluasi secara menyeluruh. Pengalaman masa lampau dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut merumuskan kebijakan publik dalam bentuk peraturan daerah yang ternyata membuahkan berbagai resistensi masyarakat, tentu menjadi pelajaran berharga bagi upaya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan.
3. Spirit dan etos kerja aparat yang perlu ditingkatkan
Peningkatan kualitas aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang mutlak dalam suatu pemerintahan yang baik. Kondisi ini dapat tercapai apabila aparat pemerintah daerah memiliki kesadaran akan tugas dan tanggungjawabnya, serta memiliki spirit dan etos kerja yang baik.
4. Kinerja pelayanan yang belum optimal
Pelayanan masyarakat sebagai fungsi utama pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya terlaksana berdasarkan prinsip - prinsip pelayanan yang baik dan prima. Ketepatan standar pelayanan atas prosedur dan produk pelayanan, mata rantai pelayanan yang masih belum efisien, rendahnya tingkat *complain management*, kurang optimalnya aktivitas *quality control* dan *quality assurance*, masih terasanya budaya kekuasaan dan bukan budaya pelayanan, kurang diterapkannya prinsip *equity*, *equality*, dan *fairness* dalam pemberian pelayanan, adalah merupakan beberapa masalah yang dihadapi oleh kinerja pelayanan publik warga kota.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010

Salah satu indikator untuk melihat gambaran pembangunan ekonomi daerah adalah dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ditinjau dari segi pendapatan Kota Probolinggo, PDRB merupakan jumlah dari semua pendapatan yang timbul oleh karena ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi di wilayah Kota Probolinggo. Pada tahun 2003 PDRB (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000) Kota Probolinggo sebesar Rp.1,355 triliun, Angka PDRB ini meningkat menjadi sebesar Rp. 1,432 triliun pada tahun 2004, meningkat menjadi Rp.1,514 triliun pada tahun 2005, pada tahun 2006 menjadi Rp.1,603 triliun dan meningkat menjadi Rp. 1,706 triliun (angka sementara) pada tahun 2007. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2003 sebesar 4,02 %, tahun 2004 sebesar 5,62 %, tahun 2005 sebesar 5,74 %, tahun 2006 sebesar 5,92 % dan meningkat menjadi sebesar 6,39 % tahun 2007. Dari data tersebut maka perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tahun 2008 sebesar 6,02 %, tahun 2009 sebesar 5,11 % dan perkiraan tahun 2010 sebesar 6,3 %.

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011

Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengemban visi dan misinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni situasi, kondisi, keadaan, peristiwa dan pengaruh - pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud terdiri atas dua komponen utama, yaitu lingkungan internal Kota Probolinggo dan lingkungan eksternal Kota Probolinggo. Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis, yakni faktor kekuatan yang dimiliki Kota Probolinggo dan dapat didayagunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, serta faktor kelemahan yang ada pada Kota Probolinggo yang apabila tidak diatasi dapat menjadi kendala bagi upaya mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan lingkungan eksternal, juga terdiri atas dua faktor strategis, yakni faktor peluang yang berada di luar struktur Kota Probolinggo dan dapat didayagunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, serta faktor tantangan atau ancaman yang harus diintervensi oleh Kota Probolinggo dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Hasil analisis terhadap faktor-faktor strategis tersebut (dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT – *Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats*), akan menghasilkan faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*), yakni faktor yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Probolinggo. Ditetapkan sebagai faktor-faktor yang sangat menentukan, sebab berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diwujudkan oleh Kota Probolinggo.

A. FAKTOR INTERNAL

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah

membuka peluang untuk menggali potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga kota ;

- b. Dilaksanakannya reformasi administrasi publik memungkinkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin keterlibatan masyarakat dan sektor swasta ;
- c. Tersedianya sumber daya manusia masyarakat warga kota dengan jumlahnya yang cukup besar dan dengan sikapnya yang terbuka, kritis, dinamis, dan adaptif adalah merupakan potensi yang dapat didayagunakan untuk mendukung pembangunan kota ;
- d. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung, baik aset pemerintah daerah maupun dukungan masyarakat dan dunia usaha, yang dapat didayagunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya potensi daerah kota ;
- e. Terjalannya hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memungkinkan harmonisasi perumusan kebijakan pembangunan daerah, yang ditunjang oleh tumbuh dan berkembangnya jalinan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan Masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Masih belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilihat dari aspek efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, sehingga mempengaruhi kualitas pelaksanaan fungsi pelayanan dan penyediaan barang publik serta fungsi pengaturan dan perlindungan kepentingan publik ;
- b. Masih belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas kerja pemerintahan daerah, sehingga memperlemah daya saing pemerintah daerah dalam meraih keuntungan kompetitif yang sangat diperlukan bagi akselerasi pembangunan daerah;
- c. Masih belum mantapnya penerapan *new public management* dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga memperlemah harapan dukungan peran dari domain sektor swasta sebagai pelaku pembangunan daerah ;
- d. Masih belum optimalnya tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas produk penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah ;
- e. Masih belum optimalnya usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sehingga menjadikan daya dukung dalam penyediaan dana penerimaan daerah terbatas, dan kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan investasi pemerintah daerah ;

B. FAKTOR EKSTERNAL

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban daerah kota yang cukup kondusif memberi jaminan kepercayaan pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi yang berguna bagi akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Berkembangnya iklim demokratisasi yang memungkinkan segenap unsur dan komponen masyarakat warga kota berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan kota;
- c. Terbukanya jejaring kerja, baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun dengan unsur swasta nasional dan daerah, yang dapat didayagunakan untuk mengembangkan perekonomian daerah;
- d. Semakin kuat dan berperannya organisasi sosial, politik dan kemasyarakatan serta lembaga-lembaga non pemerintah yang dapat dijadikan *partnership* dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- e. Adanya potensi budaya dan kearifan lokal yang agamis, yang merupakan peluang untuk dapat didayagunakan dalam rangka mengatasi berbagai problema pembangunan daerah.

2. Ancaman/Tantangan (*Threats*)

- a. Masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang diperparah dengan iklim yang belum cukup kondusif untuk menarik investasi swasta dan masyarakat guna akselerasi pembangunan kota ;
- b. Masih terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, sehingga berdampak pada kondisi masih cukup tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin perkotaan;
- c. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada adanya ancaman meningkatnya penyakit sosial dan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
- d. Masih belum dapat diwujudkan secara optimal pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang berdampak masih terjadinya tindakan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ;
- e. Globalisasi teknologi informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi mempengaruhi karakter dan kearifan budaya lokal.

C. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor-faktor inilah keberhasilan

pembangunan daerah Kota Probolinggo akan diupayakan secara maksimal untuk dicapai sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan diketahuinya faktor-faktor penentu keberhasilan, maka Kota Probolinggo telah siap secara lahir batin untuk beroperasi dan berinteraksi dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT, yakni dengan langkah analisis asumsi strategis dan analisis pilihan asumsi strategis, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kota Probolinggo, sebagai berikut :

1. Manfaatkan praksis otonomi daerah dan implementasi kebijakan reformasi administrasi publik untuk perbaikan manajemen pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Mantapkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat guna mengatasi pengaruh krisis ekonomi dan memulihkan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Daerah.
3. Kelola sumber daya alam lokal yang potensial dan prospektif untuk peningkatan kemakmuran daerah dengan dilandasi prinsip keberlanjutan pembangunan daerah dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.
4. Dayagunakan potensi kearifan budaya lokal yang agamis untuk dasar penciptaan iklim yang kondusif bagi penangkalanc ancaman kerawanan sosial dan terjadinya konflik sosial serta ancaman pengaruh globalisasi teknologi informasi dan dampak kemajuan iptek, demi peningkatan investasi pembangunan daerah.
5. Manfaatkan terbukanya jejaring kerja dengan berbagai pihak eksternal guna meningkatkan kemampuan daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
6. Tingkatkan nilai investasi pembangunan daerah dengan sasaran peningkatan produksi dan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna membangun daya saing pembangunan daerah.

Kondisi ekonomi makro Kota Probolinggo sampai tahun 2008 menunjukkan adanya pertumbuhan positif sebesar 6,02 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo jika dibanding dengan tahun sebelumnya distimulasi oleh semua sektor pembangunan, yang menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi di Kota Probolinggo terus berlangsung dan semakin baik. Bila diukur dari Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2000, PDRB Kota Probolinggo Tahun 2003 sebesar Rp. 1,355 triliun, Angka PDRB ini meningkat menjadi sebesar Rp. 1,432 triliun pada tahun 2004, meningkat menjadi Rp.1,514 triliun pada tahun 2005, pada tahun 2006 menjadi Rp.1,603 triliun, meningkat menjadi Rp. 1,706 triliun pada tahun 2007 dan menjadi Rp. 1,806,- triliun pada tahun 2008 serta meningkat menjadi 1.923 triliun (angka sementara) pada tahun 2009 . Kontribusi terbesar dari PDRB tersebut berasal dari sektor perdagangan. Oleh karena itu ke depan Kota Probolinggo juga harus memacu kontribusi sektor lain sehingga terjadi keseimbangan pembangunan dari berbagai sektor terutama sektor-sektor utama yang merupakan mata pencaharian penduduk Kota Probolinggo.

Dengan memperhatikan berbagai kemajuan ekonomi yang telah diraih serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan pembangunan daerah maka prospek ekonomi Kota Probolinggo tahun 2010 diharapkan sebagai berikut :

1. Membaiknya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita;

2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai pemerataannya;
3. Tercapainya stabilitas ekonomi yang mantap.

3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah tahun 2011 diarahkan untuk **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Perekonomian dan Kesempatan Kerja Dengan Usaha Ekonomi Produktif Yang Berkelanjutan**. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diupayakan dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan terjaganya stabilitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi, ekspor dan pengeluaran pemerintah serta mendorong peningkatan sektor industri pengolahan, revitalisasi pertanian dan menggerakkan UKM. Peningkatan investasi dan ekspor didorong dengan meningkatkan daya tarik investasi baik di dalam maupun luar negeri, mengurangi hambatan prosedur perijinan, meningkatkan kepastian hukum terhadap peraturan - peraturan daerah yang menghambat dan mendorong komoditi non migas yang bernilai ekspor. Investasi didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumber daya produktivitas serta mempercepat pembangunan infrastruktur.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan terus didorong. Perbaikan iklim ketenagakerjaan akan ditingkatkan dengan menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan, mendorong pelaksanaan bipartit serta penyusunan standar kompetensi. Perhatian juga diberikan pada penempatan, perlindungan dan pembiayaan tenaga kerja ke luar negeri. Pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan didorong melalui peningkatan produksi pangan, produktivitas pertanian secara luas dan diversifikasi pangan. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.

3.4 Analisis dan Perkiraan Sumber – sumber Pendanaan Daerah

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedang penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain – lain Pendapatan yang sah.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi :

1. Pendapatan pajak daerah;
2. Pendapatan retribusi daerah;
3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain – lain PAD yang sah.

Sedangkan pendapatan transfer, meliputi:

1. Dana perimbangan, yang terdiri :
 - Dana bagi hasil pajak;
 - Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)
 - Dana alokasi umum;

- Dana alokasi khusus.
- 2. Transfer Pemerintah Pusat lainnya, terdiri dari :
 - Dana otonomi
 - Dana penyesuaian
- 3. Lain – lain pendapatan yang sah, meliputi :
 - Pendapatan hibah;
 - Pendapatan lainnya.

**Prediksi Pendapatan Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2010 – 2011
(Juta Rupiah)**

NO	URAIAN	2010	2011
1	2	3	4
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.003,802	42.003,991
	DANA PERIMBANGAN	328.812,183	338.829,697
	Bagi Hasil Pajak	39.314,618	41.280,349
	Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-
	Dana Alokasi Umum	268.392,765	276,444,547
	Dana Alokasi Khusus	21.104,800	21.104,800
	Dana Perimbangan Provinsi	-	-
2	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	78.579,095	80.936,468
	PENDAPATAN DAERAH	447.395,081	461.770,158

3.5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan daerah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan – peraturan tersebut , maka arah kebijakan keuangan daerah dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam mengalokasikan anggaran belanja langsung dan tidak langsung didasarkan pada fungsi ekonomi dengan menggunakan prinsip anggaran kinerja bagi seluruh pengguna anggaran dan barang daerah;
2. Anggaran belanja langsung diarahkan untuk meningkatkan fungsi – fungsi pelayanan umum pemerintahan secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja SKPD;
3. Anggaran belanja tidak langsung diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3.6 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang pertama harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan yang diterima oleh daerah selama satu tahun anggaran. Dengan diketahuinya total pendapatan yang diperkirakan diterima selama satu tahun anggaran, maka setelah dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan dalam tahun yang bersangkutan akan dapat terlihat apakah anggaran yang tersedia dapat menutupi kebutuhan pembiayaan (belanja) atau tidak. Apabila ternyata rencana kebutuhan belanja lebih besar dari rencana pendapatan daerah, maka daerah harus berupaya menutupi kekurangan (defisit) tersebut.

Dari hasil analisa trend sumber – sumber pendapatan daerah, proporsi terbesar pendapatan daerah berturut – turut bersumber dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah (PAD) dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Kondisi ini menggambarkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan masih sangat tergantung kepada dana Pemerintah Pusat. Untuk itu strategi yang perlu dioptimalkan dalam meningkatkan koordinasi terhadap sumber – sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari departemen – departemen pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kebijakan yang akan ditempuh adalah :

- A. Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah;
 - I. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dilakukan dengan cara :
 1. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran;
 2. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku;
 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan PAD;
 4. Memberikan insentif secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui pemungutan di lapangan;
 5. Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajiban melalui kegiatan penyuluhan;
 6. Melakukan langkah – langkah pengendalian lain guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah;
 7. Peningkatan kualitas SDM aparatur bidang pendapatan.
 - II. Ekstensifikasi, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 1. Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah;
 2. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah.

- III. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan daerah terutama yang berasal dari dana perimbangan.

3.7 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah mempertimbangkan analisa standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kebijakan belanja daerah adalah mengoptimalkan belanja daerah dalam membiayai program – program SKPD, lintas SKPD dan Program – Program kewilayahan yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran.

3.8 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD. Pembiayaan daerah dapat bersumber dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
6. Penerimaan piutang daerah.

Kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan pembiayaan daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkannya.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2009 dan perkiraan tahun 2010, serta tantangan yang dihadapi tahun 2011, tema pembangunan pada tahun 2011 adalah : “Pengembangan Sarana dan Prasarana Perekonomian dan Kesempatan Kerja Dengan Usaha Ekonomi Produktif yang Berkelanjutan”

Sehubungan dengan tema pembangunan tahun 2011 tersebut diatas, maka dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini , terdapat 5 (lima) prinsip – prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara, yaitu :

1. Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif.
2. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan generasi berikutnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup tiga utama pembangunan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling menunjang dan terkait. Lingkungan hidup yang lestari merupakan modal dasar pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berlanjut mutlak harus mempertimbangkan upaya pelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungannya. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak memperhitungkan dampak terhadap lingkungan , serta eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Untuk itu pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan pada kegiatan – kegiatan pembangunan , termasuk upaya mendukung terhadap antisipasi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim pengurangan resiko bencana perlu diintegrasikan ke dalam kegiatan prioritas pembangunan daerah terutama pada sektor - sektor pembangunan yang langsung terkait.
3. Pengarusutamaan gender. Pada dasarnya hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki – laki. Strategi pengarusutamaan gender, ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perempuan dan laki – laki menjadi mitra sejajar dan memiliki akses, kesempatan dan kontrol serta memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.
4. Pengarusutamaan tata pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk membangun tata pemerintahan yang baik di lembaga – lembaga penyelenggara negara (*good public governance*), dunia usaha (*good corporate governance*) dan

berbagai kegiatan masyarakat. Penerapan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai masalah secara efisien dan efektif secara mendorong percepatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara mencakup lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Terbangunnya tata pemerintahan yang baik tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi perlu terus dilanjutkan secara konsisten.

5. Pengarusutamaan padat karya. Program padat karya produktif dimaksudkan untuk mengurangi masalah pengangguran, setengah penganggur dan masalah kemiskinan sementara (*transient poverty*). Sasaran pemanfaatan program ini adalah penduduk miskin yang untuk sementara waktu sedang menganggur atau setengah menganggur. Melalui program ini mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang memberikan penghasilan (*income generating*). Lapangan pekerjaan produktif dalam skema ini adalah pekerjaan manual di bidang pembangunan prasarana seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, fasilitas sanitasi dan lain – lain. Penetapan kelompok sasaran, jumlah, jenis kegiatan dan lokasi yang dipilih, serta penentuan upah dalam pekerjaan yang dirancang di bawah upah minimum yang berlaku. Mekanisme sistem penyaluran dan pengelolaannya dilakukan secara transparan dan secara teknis dan administrasi kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 , kemajuan yang dicapai dalam tahun 2009 dan perkiraan tahun 2010 serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2010, maka prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan kawasan selatan;
2. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian dan infrastruktur;

Prioritas pembangunan tahun 2011 di atas ditempuh dengan sasaran, fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- I. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Kawasan Selatan;

SASARAN

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas I pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Kemiskinan

1. Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan;
2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau oleh penduduk miskin;
3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara mudah, murah atau gratis dan bermutu;
4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar secara gratis, bermutu dan merata;

5. Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak huni, sanitasi lingkungan yang sehat, dan kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin;
6. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta akses permodalan dalam menciptakan dan mengembangkan usaha;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Tridaya yakni pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan;
8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat dalam mengelola usaha secara mandiri dan kolektif;
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam proses perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
10. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pendidikan

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, yang diukur dari :
 - a. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI dan Paket A sebesar 2,5% dan APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 27%;
 - b. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD/MI dan Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 52%;
 - c. Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI/Paket A menjadi 2% dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi sebesar 10%;
 - d. Menurunnya rata-rata lama menyelesaikan pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI/Paket A menjadi 2,5% dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi sebesar 1,25%;
 - e. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99% dan penduduk usia 13-15 tahun menjadi sebesar 88%;
2. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah, yang diukur dari :
 - a. Meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) menjadi 89,30%;
 - b. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah menjadi 85,25%;
 - c. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah menjadi 1%;
3. Meningkatnya proporsi pelayanan pendidikan, yang ditandai dengan : (a) meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini, (b) meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup, (c) meningkatnya proporsi keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat, antara perkotaan dan perdesaan, antara penduduk kaya dan miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, (d) proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta;
4. Meningkatnya kualitas pendidikan dari sisi persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan dan meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan;

5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan, dan manajemen pelayanan pendidikan.

Kesehatan

1. Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 71 tahun;
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 12 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup;
3. Menurunnya angka kematian ibu pasca melahirkan dari 2,31 menjadi 1,25 per 1000 kelahiran hidup;
4. Menurunnya prevalensi gizi buruk pada anak Balita dari 15% menjadi 13%;
5. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dari 50,93% menjadi 90%;
6. Meningkatnya ratio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dengan jumlah penduduk menjadi 1:30.000 (Puskesmas) dan atau 1:10.000 (Puskesmas pembantu);
7. Meningkatnya jumlah Posyandu Purnama Mandiri sebanyak 34% menjadi 40%;
8. Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan dari 65,3% menjadi 80%.

Keluarga Berencana

1. Meningkatkan pengendalian tingkat kelahiran penduduk, kualitas kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, pendapatan keluarga dan kualitas lingkungan keluarga, serta memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan keluarga berencana berkerjasama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan;

Ekonomi Lokal

1. Tumbuhnya usaha skala mikro, kecil dan menengah yang sehat dan dinamis dengan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi;
2. Meningkatnya produktivitas usaha dan daya saing UMKM dan koperasi di era pasar bebas;
3. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal;
4. Berkembangnya iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM dan koperasi;
5. Meningkatnya akses yang lebih luas bagi UMKM dan koperasi terhadap sumber daya produktif;
6. Bertambahnya jumlah anggota dan masyarakat koperasi yang mempunyai komitmen pada kemajuan koperasi;
7. Meningkatnya peranan UMKM dan koperasi dalam menunjang laju.

Kelengkapan kota

1. Terpenuhinya ketersediaan utilitas kota yang memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat warga kota;
2. Tertatanya jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih dan air limbah guna mendukung dan menggerakkan ekonomi masyarakat;
3. Bertambahnya jumlah dan kualitas titik lampu penerangan di jalan dan tempat umum;

4. Tertanganinya pembuangan air limbah dengan baik serta meningkatnya pelayanan dalam pengelolaan air limbah oleh aparat yang berwenang;
5. Meningkatnya mutu pelayanan dan distribusi air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat;

Sumber Daya Air

1. Berkurangnya ancaman banjir lokal dan genangan air, baik banyaknya lokasi maupun sebarannya;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas saluran air (drainase) serta meningkatnya kapasitas saluran penghubung penampungan debit air;
3. Tertatanya jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya.

Transportasi

1. Meningkatnya kinerja jaringan jalan dan aksesibilitas baik di dalam maupun antar kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi, serta tersedianya fasilitas trotoar yang memadai bagi pejalan kaki;
2. Meningkatnya akses serta kelancaran arus transportasi antar moda, menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas, meningkatnya keselamatan lalu lintas, dan menurunnya pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor;
3. Menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan di jalan;
4. Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas;
5. Meningkatnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan transportasi jalan serta kelancaran dan keterjangkauan pelayanan umum transportasi oleh masyarakat, terutama angkutan umum di perkotaan dan antar kota;
6. Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan dan kesadarannya dalam penanganan dampak polusi;
7. Terwujudnya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang terpadu sehingga dapat memberikan peringatan, perintah atau petunjuk dan arahan bagi keselamatan pengguna jalan;
8. Terwujudnya sistem transportasi yang efektif, tertib, lancar dan aman.

- II. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian dan infrastruktur.

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas pembangunan tersebut di atas adalah:

Pertanian

1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan pertanian dalam arti luas guna menjaga sistem produksi dengan baik;
2. Terjaganya stabilitas harga produk pertanian;
3. Berkembangnya kembali tanaman mangga dan anggur sebagai tanaman *icon* Kota Probolinggo;
4. Meningkatnya akses petani, peternak dan pembudidaya ikan kepada sumber daya produktif;
5. Meningkatnya kemampuan petani dan peternak untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi;

6. Terciptanya pola panganekaragaman pangan dan gizi masyarakat;
7. Berkembangnya komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan;
8. Tercapainya optimalisasi pengembangan perhutanan sosial, hutan kota dan hutan pantai.

Kelengkapan Kota

1. Terpenuhinya ketersediaan utilitas kota yang memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat kota;
2. Tertatanya jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih dan air limbah guna mendukung dan menggerakkan ekonomi masyarakat;
3. Bertambahnya jumlah dan kualitas titik lampu penerangan di jalan dan tempat umum;
4. Tertanganinya pembuangan air limbah dengan baik serta meningkatnya pelayanan dalam pengelolaan air limbah oleh aparat yang berwenang;
5. Meningkatnya mutu pelayanan dan distribusi air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup

1. Meningkatnya pemanfaatan hasil sumber daya alam secara berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan masyarakat;
2. Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai baku mutu lingkungan yang ditetapkan, dengan penanda meningkatnya kualitas air sungai, berkurangnya pencemaran air dan tanah, membaiknya kualitas udara khususnya di kota, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Meningkatnya pengendalian dampak lingkungan, pelestarian plasma nutfah serta kualitas lingkungan seiring dengan meningkatnya kualitas kelestarian alam dan jumlah warga masyarakat yang memiliki kepedulian dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut :

- I. Urusan Wajib
 1. Urusan Pendidikan
 2. Urusan Kesehatan
 3. Urusan Pekerjaan Umum
 4. Urusan Perumahan
 5. Urusan Penataan Ruang
 6. Urusan Perencanaan Pembangunan
 7. Urusan Perhubungan
 8. Urusan Lingkungan Hidup
 9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
 10. Urusan Pemberdayaan Perempuan
 11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 12. Urusan Sosial
 13. Urusan Tenaga kerja
 14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 15. Urusan Penanaman Modal
 16. Urusan kebudayaan
 17. Urusan Pemuda dan Olah raga
 18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 19. Urusan Pemerintahan Umum
 20. Urusan Kepegawaian
 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 22. Urusan Kearsipan
 23. Urusan Komunikasi dan Informasi
- II. Urusan Pilihan
 1. Urusan Pertanian
 2. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
 3. Urusan Pariwisata
 4. Urusan Kelautan dan Perikanan
 5. Urusan Perdagangan
 6. Urusan Perindustrian

Secara lengkap kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 sebagaimana lampiran.

PENDANAAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo pada tahun 2010 pendapatan daerah sebesar Rp.447.333.404.109,17 menurun jika dibandingkan pada pendapatan tahun 2009 sebesar Rp. 471.917.427.669,97,- sedangkan

pendapatan daerah tahun 2011 diprediksi sebesar Rp. 461.770.158.000,-. Selain itu pembangunan di Kota Probolinggo juga dibiayai oleh anggaran dari pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sumber penerimaan APBD Kota Probolinggo berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.40.071.301.766,74, dana perimbangan sebesar Rp.328.683.000.958,- dan lain – lain pendapatan yang sah sebesar Rp.78.579.095.384,43. Pada tahun 2011 prediksi PAD sebesar Rp.42.003.991.000,-, dana perimbangan sebesar Rp.338.829.697.000,- dan lain – lain pendapatan yang sah sebesar Rp.80.938.468.000,-.

Mengingat keterbatasan anggaran yang digunakan dalam pembangunan daerah dibandingkan sasaran yang harus diraih maka partisipasi aktif masyarakat dan peran serta swasta mutlak dibutuhkan. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo agar peran serta tersebut dapat meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai sosialisasi untuk membangun kesadaran partisipasi dan membangun kemitraan secara sinergis dengan pihak swasta.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Probolinggo akan terus melakukan upaya - upaya baik yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi, melalui penggalan secara optimal sumber-sumber penerimaan alternatif tanpa memberatkan masyarakat. Disisi lain Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan juga melakukan upaya-upaya peningkatan investasi yang berbasis keunggulan lokal, sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah baik pajak maupun non pajak.

Secara internal, Pemerintah Kota Probolinggo juga akan melakukan upaya - upaya efisiensi penggunaan anggaran melalui analisis yang cermat terhadap alokasi anggaran berdasarkan urutan prioritas serta melakukan penekanan terhadap semua peluang terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan anggaran.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011, Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Instansi wajib menerapkan prinsip – prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing – masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan atau Musrenbang, seperti musrenbang kelurahan, kecamatan dan musrenbang tingkat kota. RKPD tahun 2011 merupakan acuan bagi badan, dinas, kantor, bagian dan instansi maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Badan, dinas, kantor, bagian dan instansi maupun masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program – program RKPD Tahun 2011 dengan sebaik – baiknya;
2. RKPD Tahun 2011 menjadi acuan dan pedoman bagi badan, dinas, kantor, bagian/instansi dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing – masing instansi, setelah menerima pagu sementara tahun 2011, perlu menyesuaikan Rencana Kerja menjadi Rencana Kerja dan Anggaran sebagai berikut :
 - a. Uraian penggunaan APBD Tahun 2011, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun 2011, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan penggunaan anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah.
3. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas – luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat

berperanserta dalam pelaksanaan program – program pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program – program pembangunan.

4. Pada akhir tahun 2011, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD , serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan – peraturan lainnya;
5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap instansi wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Probolinggo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Probolinggo, 25 Juni 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd,
HM. BUCHORI